

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kawasan Asia Tenggara menjadi perhatian Tiongkok dikarenakan potensi ekonominya dan intensitas masuknya negara barat yang masuk ke wilayah tersebut. Adanya negara yang dekat dengan Amerika meliputi Australia yang menjadi salah satu investor besar di wilayah Asia Tenggara, Uni Eropa yang menjalin berbagai perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif dengan berbagai negara di Asia Tenggara, dan Jepang yang melakukan berbagai studi kelayakan mengenai pembangunan kereta cepat di India, Thailand, dan Vietnam kemudian menjadi alasan Tiongkok memberikan perhatian lebih ke Asia Tenggara (Allan Gyngell, 2007).

Tiongkok memiliki peran sebagai peninjau di dalam forum *Pasific Island Forum* dimana didalamnya Indonesia juga menjadi *Post-Forum Dialogue Partner* (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019). Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi yang besar di kawasan Asia Tenggara tentu saja menarik perhatian Tiongkok untuk menawarkan berbagai kerjasama salah satunya melalui program *Belt and Road Initiative* yang merupakan salah satu kebijakan luar negeri Tiongkok untuk meningkatkan serangkaian kerjasama melalui pembangunan infrastruktur di berbagai negara (Negara & Suryadinata, 2018).

Pada dasarnya, suatu negara membutuhkan kolaborasi yang baik dalam berbagai tingkat hubungan internasional, baik itu dalam bentuk bilateral, regional,

maupun multilateral, guna mencapai kepentingan nasionalnya. Melalui kerja sama dengan negara lain, terutama dalam sektor ekonomi, politik, dan sosial, negara dapat memperkuat keamanannya serta melaksanakan program-program di dalam negeri. Dengan demikian, kerja sama internasional menjadi kunci bagi kemajuan negara dalam segala aspek. Hal ini juga berlaku dalam hubungan antara Tiongkok dan Indonesia, di mana kerja sama bilateral penting untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan dan meningkatkan kesejahteraan kedua negara (Fulton, 2020).

Indonesia membutuhkan investasi dari dalam maupun luar negeri guna mendorong percepatan pemerataan infrastruktur di negaranya karena adanya keterbatasan biaya untuk melakukan hal tersebut. Hadirnya Tiongkok sebagai negara besar di Indonesia menunjang kebutuhan Indonesia terkait pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur memiliki dampak yang luas pada suatu wilayah, termasuk dari segi ekonomi. Pembangunan infrastruktur diharapkan mampu meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi, baik di wilayah tempat infrastruktur tersebut dibangun maupun di sekitarnya. Dampak ekonominya dapat dilihat melalui berbagai indikator, seperti peningkatan produk domestik regional bruto, penurunan tingkat pengangguran, dan peningkatan output di sektor lapangan kerja (Jufrida, Syechalad, & Nasir, 2016).

Untuk menjawab kebutuhan akan sarana transportasi di Jakarta dan Bandung, berbagai layanan transportasi telah bermunculan, termasuk transportasi darat dan udara. Semua layanan tersebut berusaha untuk unggul dalam mencapai tujuan masing-masing layanan, yaitu memperoleh keuntungan dan memberikan layanan

yang optimal. Salah satu moda transportasi darat yang populer di kalangan masyarakat adalah kereta api. Kereta api dipilih karena menawarkan harga yang terjangkau, keamanan, kenyamanan, rendahnya tingkat polusi, daya tarik yang luas, kemampuan beradaptasi dengan kemajuan teknologi, dan potensi penggunaannya secara nasional. Kereta Cepat Jakarta-Bandung sebagai infrastruktur transportasi yang menghubungkan Jakarta dan Jawa Barat, transportasi ini diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi positif pada wilayah-wilayah yang dilewatinya. Jakarta dan Bandung, sebagai pusat industri, perdagangan, pemerintahan, serta tujuan wisata di Jawa Barat, memiliki tingkat mobilitas yang tinggi bagi para pelaku kegiatan di kedua kota tersebut (Pratiwi, et al., 2022).

Kesepakatan mengenai kerjasama proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung dimulai saat Presiden Joko Widodo datang pada agenda KTT APEC pada November 2014 di Beijing. Pada pertemuan tersebut, Tiongkok menarik perhatian Presiden Joko Widodo dengan memberikan kesempatan untuk mencoba kereta cepat yang beroperasi dari Beijing menuju Tiajin dengan jarak 120 km dan dapat ditempuh dalam waktu 33 menit. Ketertarikan Presiden Joko Widodo berlanjut dengan diadakannya kunjungan kepresidenan pada Maret 2015 untuk membahas tindak lanjut kerjasama investasi yang sebelumnya telah dibahas saat KTT APEC. Pada pertemuan ini, Presiden Xi Jinping menawarkan investasi sebesar Rp 89 Triliun atau US\$ 5,5 miliar yang kemudian terdapat pembengkakan akibat keterlambatan dalam pembangunan yang disebabkan oleh beberapa masalah seperti pembebasan lahan dan adanya pandemi. Investasi yang besar tersebut digunakan untuk pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung dengan ketentuan kepemilikan

saham 40% bagi perusahaan *China Railway International* dan 60% bagi BUMN Indonesia. Skema ini membuahkan kesepakatan kerjasama antara Indonesia dan China dan menyepakati konsorsium yang dinamakan PT. Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC. Pelaksanaan kerjasama ini menggunakan sistem Business to Business antara BUMN dan perusahaan kereta api Tiongkok (Putri & Mahani, 2023).

Investasi yang dilakukan Tiongkok sebesar Rp 117 Triliun atau US\$ 7,46 Miliar per 2023 dalam pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung menunjukkan komitmen Tiongkok untuk memperkuat hubungan bilateral antara Tiongkok dan Indonesia. Hal tersebut dapat membuat Tiongkok lebih percaya diri untuk mendapatkan dukungan dari Indonesia khususnya dalam forum regional maupun internasional yang merupakan sebagai suatu aset strategis bagi kepentingan geopolitik dan ekonomi Tiongkok. Keterlibatan perusahaan Tiongkok dalam pembangunan tersebut juga mendukung industri dalam negerinya untuk melakukan ekspansi ke luar negeri. Sehingga pembangunan tersebut sangat mendukung kepentingan nasional Tiongkok untuk menjaga stabilitas serta ekspansi kehadirannya di Indonesia (Putri & Mahani, 2023). Peningkatan kerja sama pembangunan antara Tiongkok dan Indonesia telah menciptakan tingkat saling ketergantungan yang lebih besar bagi kedua negara. Tiongkok memiliki kepentingan dalam meningkatkan kesejahteraan negaranya melalui implementasi *Belt and Road Initiative* yang sejalan dengan upaya Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan melalui proyek pembangunan.

Sebelum adanya proyek pembangunan kereta cepat, kondisi masyarakat di

sekitar stasiun tegalluar dan stasiun padalarang yang akan menjadi fokus pada penelitian ini masih terbelakang apabila di banding dengan wilayah kecamatan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Jumlah keberadaan perusahaan industri yang ada di wilayah stasiun tegalluar masih sangat sedikit dibanding dengan wilayah lainya yang ada di kabupaten Bandung (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, 2016). Pada tahun 2017, wilayah Padalarang sendiri masih banyak penduduk yang tidak bekerja. Penyaluran tenaga kerja dari wilayah tersebut juga sangat rendah jika dibandingkan dengan kecamatan lainya di wilayah Kabupaten Bandung Barat (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat, 2017).

Kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok dalam pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung diharap dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing negara. Keuntungan yang didapatkan dapat berupa peningkatan pertumbuhan ekonomi, kemajuan dalam berbagai bidang, dan melengkapi kebutuhan kedua negara. Interdependensi antara Indonesia dan Tiongkok menghasilkan dampak yang signifikan karena adanya perbedaan dalam keunggulan yang dimiliki oleh masing-masing negara (Octorifadli, Puspitasari, & Azzqy, 2022). Oleh karena hal tersebut, penelitian ini memiliki tujuan guna menjawab bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh kerjasama pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung bagi Indonesia dan masyarakat di sekitar proyek tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka muncul suatu pertanyaan penelitian yaitu “Bagaimana dampak dari kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok dalam pembangunan Kereta Cepat

Jakarta-Bandung bagi masyarakat disekitar Stasiun Tegalluar dan Stasiun Padalarang? ”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini dilakukan untuk melihat dinamika kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok dalam membangun Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah memberikan analisis terkait bagaimana *Interdependensi* antara Indonesia dan Tiongkok dapat menghasilkan suatu kerjasama dan menganalisis kembali bagaimana dampak dari kerjasama yang ditimbulkan bagi masyarakat yang di sekitar Stasiun Padalarang dan Tegalluar.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi studi Hubungan Internasional dalam bidang Akademik. Hasil kajian analisis diatas mengenai bagaimana hasil dari kerjasama ini diharap dapat memberikan wawasan baru dalam sudut pandang sivitas akademika Hubungan Internasional untuk mendalami permasalahan khususnya dalam ruang lingkup ekonomi politik internasional.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini bermanfaat secara praktis untuk menunjang penelitian baru dimana penelitian ini memberikan pandangan bagaimana penggunaan

teori yang digunakan dapat mengkaji isu dampak dari kerjasama antar negara dalam pembangunan infrastruktur bagi masyarakat disekitarnya. Penelitian ini juga diharap dapat membantu untuk mengevaluasi kerjasama internasional sehingga dapat menjadi pertimbangan untuk kerjasama internasional selanjutnya.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

Dalam menunjang penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa penelitian, jurnal, serta buku yang dirasa relevan dengan topik yang menjadi pembahasan sebagai rujukan dalam tinjauan pustaka. Kajian pustaka yang pertama berjudul *The effects of foreign borrowing policies on economic growth: success or failure?* Dimana didalamnya menginvestigasi hubungan antara pinjaman sektor publik dari luar negeri dan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pinjaman luar negeri dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dengan membiayai investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, yang merupakan prasyarat untuk pembangunan jangka panjang. Fuhmei Wang menemukan bahwa pinjaman luar negeri dapat meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi jika dikelola dengan bijak, dengan menekankan pentingnya solvensi dan substitusi konsumsi yang bertanggung jawab (Wang, 2009).

Kajian pustaka yang kedua merupakan sebuah jurnal yang berjudul *Developmental Railpolitics: The Political Economy of China's High-Speed Rail Projects in Thailand and Indonesia* Dalam jurnal ini, Diterangkan bahwa Pembangunan kereta cepat oleh Tiongkok di Indonesia dan Thailand dilihat sebagai bagian dari ambisi geostrategis Tiongkok untuk memperkuat pengaruhnya di Asia

Tenggara tanpa menimbulkan kontroversi seperti yang sering terjadi dalam isu lain seperti militerisasi Laut Tiongkok Selatan atau modernisasi militer. Proyek ini diharapkan bisa meningkatkan hubungan ekonomi dengan Indonesia, negara terbesar di Asia Tenggara, sambil memberi ruang bagi negara-negara tersebut untuk manuver politik terhadap Tiongkok (Shang-Su Wu, 2018).

Kajian pustaka yang ketiga merupakan jurnal dari *Ilomata International Journal of Social Science* yang berjudul *China as an Alternative Source of FDI: Analyzing The Cases in Indonesia*. Dalam jurnal ini, peneliti menemukan bahwa Indonesia memandang Tiongkok sebagai sumber investasi langsung asing (FDI) alternatif, yang dimanifestasikan dalam konstruksi proyek Kereta Cepat Indonesia, proyek Huawei, dan di sektor energi Indonesia. Keunggulan Tiongkok dalam masuk dan ekspansi di Indonesia didukung oleh kurangnya pembatasan pendanaan jika dibandingkan dengan lembaga-lembaga Barat (Said Rivaldi Assagaf, 2023).

Kajian pustaka yang keempat merupakan sebuah karya analisis yang berjudul *Ocean of debt? Belt and Road and debt diplomacy in the Pacific* karya Roland Rajah, Alexandre Dayant, dan Jonathan Pryke pada tahun 2019. Penulis dalam analisisnya menerangkan bahwa tidak ada bukti yang membenarkan tuduhan terhadap Tiongkok mengenai Debt Trap. Namun terdapat kekurangan dimana Tiongkok memberikan pinjaman yang sangat besar namun kurang memberikan perlindungan dalam mekanisme pemberian dana sehingga negara penerima memiliki resiko mengalami kegagalan pembayaran yang besar. Penulis juga membandingkan skema Belt And Road yang dilakukan Tiongkok dengan sistem Foreign Aid oleh Australia yang dinilai oleh penulis lebih sederhana serta

menggunakan mekanisme pinjaman yang berguna untuk melindungi keberlanjutan pengelolaan dana oleh negara penerima donor. Penulis juga menyebutkan bahwa negara penerima donor agar menghindari bantuan geopolitik yang berlebihan hingga menimbulkan resiko.

Kajian pustaka selanjutnya merupakan sebuah jurnal yang terdapat di Journal International Relations Universitas Diponegoro yang berjudul China - Sri Lanka: Analisis Dampak Kehadiran China di Sri Lanka karya Ellya Yunita Aslam, Reni Windiani, dan Fendy Eko Wahyudi pada tahun 2022 dimana jurnal ini menggunakan Teori Ketergantungan menurut pandangan Theotonio Dos Santos. Di dalam jurnal ini, terdapat fakta bahwa Foreign Aid lebih menguntungkan bagi negara pendonor jika dibandingkan dengan negara penerima. Foreign Aid juga dapat digunakan dalam memperkuat hegemoni serta ketergantungan bagi negara penerima donor terhadap negara pendonor. Penulis juga menerangkan bahwa hasil dari Hambantota Port Agreement dan proyek Colombo Port City Project menunjukkan keberhasilan Tiongkok dalam memperluas pengaruhnya terhadap perekonomian Sri Lanka.

Kajian pustaka yang keenam diambil dari Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah yang berjudul Dampak Investasi Infrastruktur China Ke Indonesia karya D. N Ningsih dimana jurnal tersebut dianalisis menggunakan Teori Kerjasama Internasional menggunakan perspektif Liberalisme. Inti dari jurnal tersebut merupakan Investasi yang dilakukan pemerintah Tiongkok ke Indonesia membuat domino effect dalam pelaksanaannya. Hal tersebut terutama berpengaruh terhadap dinamika politik, ekonomi, serta sosial Indonesia. Masyarakat Indonesia juga

menjadi tersaingi dengan datangnya para pekerja dari Tiongkok untuk membangun proyek kerjasama Indonesia-Tiongkok. Dalam tulisannya, penulis berpendapat bahwa para pekerja tersebut merupakan unskilled workers yang berarti para pekerja dari Tiongkok tersebut belum tentu lebih hebat dari tenaga kerja lokal dari Indonesia. Terdapat manipulasi status kualifikasi keahlian yang dilakukan para investor Tiongkok untuk memasukan para pekerjanya di Indonesia dimana terdapat beberapa kasus yang menyeret para tenaga kerja asal Tiongkok tersebut menyangang status skilled workers di visa kerjanya.

Kajian pustaka yang ketujuh berjudul Aktualisasi Kebijakan China One Belt And One Road di Indonesia Melalui Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang terdapat pada Jurnal Dinamika Global vol 1 pada tahun 2020 yang ditulis oleh Handriyanto Wijaya. Jurnal ini menggunakan kerangka pemikiran national interest serta foreign policy untuk membantu menganalisis. Menurut penulis, Indonesia menjalin kerja sama dalam Tiongkok menggunakan kebijakan One Belt and One Road dalam membantu pembangunan infrastruktur di Indonesia. Hal tersebut karena Infrastruktur di Indonesia belum bisa optimal dalam menjalankan perdagangan antar negara serta keterbatasan anggaran. Pemerintah Indonesia memberikan beberapa keistimewaan guna menarik Tiongkok untuk memperbesar investasi di Indonesia, salah satunya dengan memilih Tiongkok dalam tender proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Sumber dari kajian pustaka yang terakhir merupakan sebuah buku yang berjudul “Sovereign Debt Diplomacies: Rethinking sovereign debt from colonial empires to hegemony” karya Pierre Penet dan Juan Flores Zendejas pada tahun 2021

dimana buku ini menggunakan dua teori yaitu teori Neo Kolonialisme dan Neo Imperialisme serta menggunakan konsep hegemoni. Dimana penulis buku ini berpendapat bahwa pembahasan dari istilah kolonial ke hegemoni dapat dijadikan pembahasan serta tuduhan dalam permasalahan hutang negara. Permasalahan seperti krisis Yunani yang disebut dengan '*Debt Colony*', Kasus hutang Argentina di pengadilan Amerika yang disebut sebagai '*Judicial Colonialism*', serta permasalahan hutang negara Tiongkok ke negara Afrika sebagai '*Debt Colonialism*'. Dalam buku ini dijelaskan bahwa istilah neo-kolonial dimaksudkan suatu negara besar yang berusaha untuk melemahkan kontrol politik serta militer ke negara yang lebih kecil. Hampir sama dengan Neo-Kolonialisme, Neo-Imperialisme digunakan untuk menggambarkan kekuasaan suatu negara besar ke satu atau lebih negara kecil dengan pelemahan kontrol namun tidak secara langsung. Sedangkan Hegemoni merupakan suatu dominasi tunggal dari negara besar ke suatu wilayah yang luas.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menyoroti ketergantungan timbal balik antara Indonesia dan Tiongkok, yang berbeda dengan penelitian lainnya dalam beberapa aspek utama. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana kebutuhan masing-masing negara dapat menciptakan kerjasama yang berdampak langsung pada masyarakat. Lebih lanjut, penelitian ini juga meneliti dampak langsung dari kerjasama ini terhadap masyarakat, baik di tingkat lokal maupun nasional. Sebagai contoh, proyek infrastruktur yang didanai oleh Tiongkok di Indonesia tidak hanya meningkatkan konektivitas dan pembangunan ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat sehingga dapat menyangkal

isu jebakan hutang yang banyak dibicarakan oleh penelitian sebelumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris untuk mengukur dampak nyata dari kerjasama ini, seperti perubahan dalam tingkat pengangguran, peningkatan pendapatan, dan perbaikan dalam akses terhadap layanan publik. Secara keseluruhan, penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menekankan pada ketergantungan timbal balik yang menghasilkan manfaat langsung bagi masyarakat, berbeda dengan penelitian lain yang lebih berfokus pada analisis kebijakan atau dampak ekonomi secara umum.

1.5.1 Liberalisme-Interdependensi

Liberalisme-Interdependensi merupakan sebuah pemikiran yang berdasar kepada suatu gagasan bahwa tatanan internasional dapat memberikan dukungan kerjasama serta dapat meminimalisir terjadinya konflik. Teori ini merupakan cara pandang yang menggabungkan elemen-elemen kunci dari teori liberalisme menggunakan pemahaman mengenai keterkaitan yang mendalam dan seringkali kompleks antara negara-negara dalam tatanan internasional. Liberalisme interdependensi memiliki prinsip pokok yang tidak rumit. Prinsip pokok tersebut merupakan, hubungan timbal balik ekonomi antar negara dapat meminimalisir risiko terjadinya perang. Ketergantungan antara kedua negara juga dapat menimbulkan upaya untuk mengejar untung bersama yang kemudian akan menciptakan harmoni sosial. Dengan adanya negara yang saling bergantung akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi serta alokasi sumber daya melalui pembangunan infrastruktur dalam negeri sehingga tidak menghambat negara lain mencapai

tujuan yang sama (Keohane & Nye, 2001).

Teori liberalisme interdependensi memiliki keterkaitan dengan penelitian ini dikarenakan terdapat beberapa indikator yang dapat membantu menjawab rumusan masalah penelitian ini, diantaranya

1. Peningkatan Ketergantungan Ekonomi

Ketergantungan ekonomi timbal balik antar negara dapat mengurangi pemicu terjadinya konflik dan meningkatkan pemicu untuk terjadinya kerjasama (Keohane & Nye, 2001).

2. Promosi Norma Dan Kebijakan Ekonomi Liberal

Pinjaman yang diberikan suatu negara biasanya disertai dengan beberapa syarat tertentu yang dapat mendorong negara penerima pinjaman untuk mengadopsi beberapa praktik yang sesuai dengan norma ekonomi global (Keohane & Nye, 2001).

3. Hubungan Antar Negara Yang Menguat

Investasi pembangunan proyek infrastruktur besar merupakan bagian dari upaya yang lebih kompleks untuk memperkuat hubungan bilateral antar negara dan membangun kemitraan strategis jangka panjang (Smith, 1994).

Dalam konteks liberalisme interdependensi, pinjaman dan investasi dalam pembangunan proyek infrastruktur dapat dijadikan sebagai alat untuk terciptanya ketergantungan ekonomi yang dapat meningkatkan stabilitas serta kerjasama yang saling menguntungkan. Sehingga, hal tersebut dapat mendukung norma ekonomi liberal dalam tata kelola dan operasi internasional. Terdapat empat konsep utama dalam *Belt and Road Initiative*. Pertama, yaitu adanya kerjasama. Kedua, saling menguntungkan. Ketiga, pengembangan, Keempat, yaitu perdamaian. Konsep tersebut sejalan dengan

pemahaman Liberalisme dimana *Belt and Road Initiative* yang di gagas oleh Tiongkok adalah bentuk dari kerjasama yang menggambarkan Liberalisme Interpedensi atau saling ketergantungan (Palabbi, 2023). Tiongkok memilih untuk mengandalkan *soft power* dibandingkan *hard power* dimana hal tersebut menunjukkan bahwa kerjasama adalah cara efektif untuk mencapai kepentingan nasional tanpa mengandalkan kekuatan militer.

Penggunaan teori Liberalisme Interpedensi dalam penelitian ini dikarenakan dalam teori tersebut melihat bahwa ketergantungan ekonomi yang bersifat timbal balik akan memicu terjadinya kerjasama. Adanya kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok dalam pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, berarti masing-masing negara memiliki kepentingan yang akan dicapai secara bersama melalui adanya timbal balik dari masing-masing negara. *Belt and Road Initiative* juga tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur namun juga memiliki dampak yang luas terhadap perekonomian, politik, dan sosial kedua negara. Teori Liberalisme Interpedensi akan membantu menjelaskan mengenai bagaimana saling ketergantungan antar Indonesia dan Tiongkok dapat menimbulkan kerjasama yang saling menguntungkan bagi kedua negara.

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Definisi Konsep

1.6.1.1 Konsep Kerjasama Internasional

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep kerjasama internasional guna membantu menjawab rumusan masalah yang ada.

Kerjasama Internasional merupakan hubungan antar dua negara atau lebih yang memiliki tujuan searah dan berpijak kepada kepentingan nasional. Konsep ini memandang bahwa secara prinsip, tidak ada negara yang dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dari negara lainya. Negara yang melakukan kerjasama internasional memiliki tujuan bersama, hal tersebut dikarenakan tidak adanya tujuan bersama pada suatu kerjasama internasional dapat dikatakan mustahil (Keohane R. O., 1989). Kerjasama Internasional juga bukan hanya bagaimana negara melakukan interaksi untuk berbagi beban, namun juga tentang memperkuat kemampuan untuk menyelesaikan masalah bersama-sama (Nye, 2000).

Kerjasama Internasional juga dilakukan untuk menunjang kebutuhan dari masing-masing negara yang terlibat guna mendorong pertumbuhan negara dalam berbagai aspek. Perbedaan kapasitas, kemampuan, dan potensi yang dimiliki masing-masing negara juga turut mendukung terjadinya kerjasama internasional karena hal tersebut menjadikan suatu negara membutuhkan kemampuan yang dimiliki negara lainya. Menurut Willian D Coplin, kerjasama internasional merupakan hasil dari upaya kolaboratif antar negara yang pada awalnya muncul karena negara-negara memiliki keinginan untuk memulai interaksi baru yang bermanfaat dengan tujuan akhir untuk mencapai tujuan bersama (Coplin, 1974). Adanya tujuan bersama maupun keinginan untuk menyelesaikan masalah

secara bersama adalah hal yang bersifat mutlak dalam suatu kerjasama. Selama negara yang terlibat masih memegang teguh kesepakatan yang ada, maka kerjasama tersebut akan terus berjalan dengan baik walaupun dalam setiap kerjasama memiliki peluang terjadinya berbagai permasalahan dan pertentangan akan kepentingan masing-masing negara.

Kerjasama internasional dapat dilakukan melalui berbagai aktor seperti negara, perusahaan dan organisasi, atau masyarakat internasional. Kerjasama Internasional juga dapat dilakukan guna mengatasi bermacam-macam masalah seperti permasalahan ekonomi, keamanan, infrastruktur, pendidikan, dan lain-lain. Suatu negara akan berinisiatif melakukan kerjasama internasional dengan negara lain semata-mata untuk mendukung kepentingan nasionalnya (Holsti, 1995).

Kerjasama Internasional juga terbagi melalui tiga jenis yang meliputi kerjasama bilateral dimana melibatkan dua negara dan memiliki tujuan untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati oleh kedua negara. Kerjasama multilateral dimana dilakukan banyak negara dan melibatkan berbagai pihak, dan kerjasama regional dimana kerjasama regional dilakukan oleh negara-negara yang berada di dalam satu kawasan tertentu untuk menyelesaikan isu di kawasan tersebut. Pada penelitian ini, perhatian peneliti terpusat pada kerjasama bilateral sebagai salah satu jenis

kerjasama internasional. Kerjasama bilateral adalah keadaan yang mencerminkan interaksi timbal balik antara pihak yang terlibat dengan negara menjadi aktor utama dalam pelaksanaannya. Terdapat beberapa motif dalam kerjasama bilateral diantaranya, memelihara kepentingan nasional, memelihara perdamaian, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi (Perwita & Yani, 2017).

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, kerjasama bilateral adalah bentuk kerjasama antara dua negara yang sama seperti Indonesia dan Tiongkok dalam kerjasama pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung dimana dalam kerjasama tersebut Indonesia dan Tiongkok memiliki kepentingan yang akan diraih melalui kerjasama pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

1.6.2 Definisi Operasional

1.6.2.1 Kerjasama Internasional

Konsep kerjasama internasional digunakan dalam penelitian ini karena terdapat berbagai faktor yang dapat mencerminkan situasi dan dinamika interaksi antara Indonesia dan Tiongkok. Kerjasama internasional merupakan hasil dari adanya hubungan interdependensi dimana suatu negara dalam mencapai kepentingan nasional yang tidak dapat terpenuhi dari dalam negeri, negara tersebut akan berusaha memenuhi kepentingan nasionalnya melalui negara lain sehingga terjalin suatu kerjasama guna menyatukan kepentingan nasional antar negara (Kartasasmita, 1977).

Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Tiongkok dalam pinjaman yang diberikan oleh Tiongkok guna membangun Kereta Cepat Jakarta-Bandung juga mencerminkan konsep kerjasama internasional. Kerjasama tersebut dilakukan guna mengembangkan pembangunan infrastruktur khususnya dalam sektor transportasi. Adanya kepentingan yang dimiliki kedua negara juga menjadi alasan terjalinya kerjasama tersebut.

Kerjasama internasional merupakan suatu hal yang esensial dalam era globalisasi saat ini, terdapat beberapa poin dari pentingnya kerjasama internasional. Pada poin pertama, Tujuan utama kerjasama internasional adalah untuk menjaga perdamaian dan keamanan global. Penekanan konsep "*soft power*" sebagai instrumen penting dalam kerjasama internasional, di mana negara dapat mencapai tujuannya melalui pengaruh dan persuasi, bukan melalui kekuatan militer. Pada poin kedua, kerjasama internasional diperlukan untuk mengatasi kemiskinan dan mendorong pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang. Pentingnya bantuan pembangunan internasional dan perdagangan bebas untuk menciptakan peluang ekonomi bagi semua negara (Lestari, 2020).

Pada poin ketiga, negara yang terjalin dalam suatu kerjasama internasional akan melakukan pertukaran pengetahuan di berbagai sektor seperti teknologi, budaya, pendidikan, dan lain-lain. Hal tersebut mengakibatkan adanya kemajuan di berbagai bidang di suatu

negara yang sebelumnya belum memiliki keterampilan dalam bidang tertentu. Pada poin keempat, adanya kebutuhan negara yang tidak dapat terpenuhi dari dalam negeri sehingga mengharuskan negara melakukan kerjasama dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sebagai salah satu contoh, kebutuhan dalam negeri untuk menunjang pembangunan berbagai infrastruktur di suatu negara dapat diatasi dengan kerjasama dengan negara lain yang memiliki sumber dana yang lebih besar (Lestari, 2020). Beberapa poin penting dari konsep kerjasama internasional tersebut akan digunakan peneliti untuk membantu dalam menganalisis rumusan masalah dalam penelitian ini.

1.7 Argumen Penelitian

Penelitian ini berargumen mengenai bagaimana dampak dari kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok dalam pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung bagi masyarakat disekitar Stasiun Tegalluar dan Stasiun Padalarang. Kerjasama yang terjalin antara Indonesia dan Tiongkok menghasilkan keuntungan bagi kedua belah negara serta masyarakat di sekitar Stasiun Tegalluar dan Padalarang. Bagi Indonesia dengan adanya kerjasama ini, kebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia perlahan mulai terpenuhi.

Bagi Tiongkok, adanya kerjasama ini memberikan peningkatan ekonomi melalui terbukanya peluang perusahaan Tiongkok untuk mengeksport teknologi dan produk ke Indonesia. Bagi masyarakat di sekitar stasiun Padalarang dan stasiun Tegalluar, adanya kerjasama ini akan memberikan lapangan pekerjaan baru,

meningkatkan penghasilan, dan memperbaiki kualitas sosial ekonomi masyarakatnya. Hal tersebut sesuai dengan teori Liberalisme Interdependensi dimana penekanan *soft power* dibandingkan *hard power* pada interaksi antar negara menghasilkan kerjasama saling menguntungkan.

1.8 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian secara kualitatif. Penelitian yang menggunakan metode memudahkan peneliti untuk mendalami fenomena dalam konteks kehidupan nyata melalui interaksi intensif dengan subjek penelitian (Yin., 2014).

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan eksplanatif dimana memiliki tujuan untuk menggambarkan data serta fakta tertentu di lapangan. Data dan Fakta di lapangan diperlukan dalam penelitian ini guna membantu menganalisis bagaimana dampak pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung bagi masyarakat sekitar.

1.8.2 Situs Penelitian

Subjek utama dalam penelitian ini berlokasi di Bandung, peneliti melakukan kegiatan wawancara langsung di lapangan. Terdapat data pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini diakses secara daring.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah masyarakat di sekitar pembangunan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung khususnya di kawasan Stasiun Kereta Cepat Tegalluar dan Padalarang.

1.8.4 Jenis Data

Jenis data yang digunakan guna menunjang penelitian ini terdapat data primer yang dipahami sebagai data yang diterima dari subjek penelitian secara langsung baik lisan atau tulisan. Serta data sekunder yang berupa kata-kata, artikel, hasil wawancara dengan masyarakat sekitar, grafik, tabel, dan dokumen resmi. Data tersebut dijadikan sebagai bahan penguatan dalam analisa serta membuat kesimpulan.

1.8.5 Sumber Data

Sumber data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder. Sumber data primer diambil dari wawancara atau pernyataan resmi dari situs pemerintah. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 7 informan yang terdiri dari 3 penduduk di sekitar Stasiun Tegalluar, 3 penduduk di sekitar Stasiun Padalarang, dan 1 Penduduk di desa Cibeber. Serta sumber data sekunder diambil dari sumber kepustakaan yang telah tervalidasi keasliannya secara resmi dimana data tersebut diambil melalui media internet atau perpustakaan.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara secara langsung dan menggunakan teknik studi pustaka atau studi literatur yang akan digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini. Teknik ini menggunakan cara menganalisis hasil wawancara dan mengumpulkan data dari membaca literatur maupun penelitian yang sudah dibuat sebelumnya serta memiliki topik yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.8.7 Analisis dan Intepretasi Data

Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini merupakan teknik kualitatif. Terdapat konseptualisasi hasil wawancara dalam bentuk transkrip yang diterprestasikan. Penggunaan teknik kualitatif dalam penelitian ini memberikan penjelasan terkait topik yang akan dibahas dalam penelitian ini. Berbagai penjelasan serta data yang ditemukan kemudian akan dianalisis sehingga dapat menjadi kesimpulan berbasis fakta.

1.8.8 Kualitas Data

Penelitian ini menggunakan data-data serta informasi dari sumber kredibel dan dapat dipercaya . Data dan informasi diambil melalui platform *free acces* yang dimiliki mahasiswa Universitas Diponegoro pada fitur SIAP dan melalui pengamatan berita melalui media lokal maupun internasional melalui Internet.